

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Administrasi publik berupaya dalam memenuhi terselenggaranya kesejahteraan warga negara di beberapa bidang, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, adil dan merata bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan, tidak terkecuali dengan warga negara yang memiliki kebutuhan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan pasal 5 ayat 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Indonesia sedang berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan melalui pendidikan inklusif. Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Pendidikan inklusif berdasarkan pasal 1 didefinisikan sebagai:

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Adapun, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tercantum dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) sebagaimana telah dirumuskan dan disahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB secara partisipatif oleh seluruh aktor pembangunan pada tujuan keempat yang berisi: “memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.” Dengan demikian, menyelenggarakan pendidikan yang inklusif merupakan salah satu kesepakatan yang tercantum dalam pembangunan global.

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Namun demikian, menurut penelitian-penelitian terdahulu yang ditinjau dari beberapa aspek seringkali ditemui permasalahan-permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apabila ditinjau dari aspek sosiologi berdasarkan hasil penelitian Reza

Dulisanti (2015) tentang *Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang)* diperoleh hasil, yaitu:

Terdapat stigma yang menghambat, bernilai jelek, kurang bisa bergaul dan adanya diskriminasi terhadap ABK yang merupakan bentuk *softbullying*. Namun pada dasarnya siswa non berkebutuhan khusus peduli dan membantu jika ABK mengalami kesulitan.

Kemudian, apabila ditinjau dari aspek psikologis berdasarkan hasil penelitian oleh Nissa Tarnoto (2016) yang berjudul *Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD* memperoleh hasil penelitian berupa:

Terdapat permasalahan yang ditemui guru terkait kesiapan sekolah itu sendiri seperti kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK, kurangnya kepedulian orang tua terhadap ABK, banyaknya siswa ABK dalam satu kelas, dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah.

Salah satu daerah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia adalah DKI Jakarta, dimana daerah ini telah ditetapkan sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 23 November 2013. Adanya penetapan tersebut salah satunya karena pada 2007, DKI Jakarta telah lebih dahulu memiliki regulasi terkait dengan pendidikan inklusif yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Kemudian pada 2009, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat regulasi terkait dengan Pendidikan Inklusif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 1 bahwa:

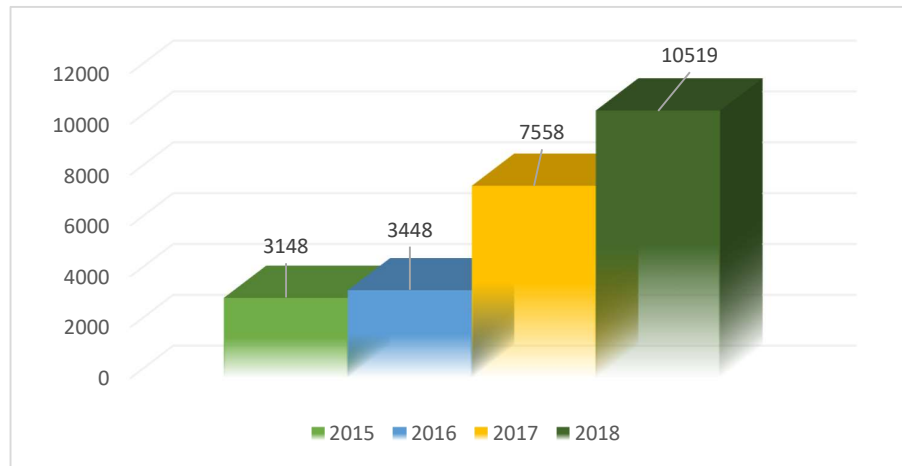
Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik

Dalam perkembangan pelaksanaannya, DKI Jakarta menunjuk sekolah-sekolah penyelenggara inklusif melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Adanya pasal di atas terkait dengan jumlah penyelenggara sekolah inklusi apabila dibandingkan dengan regulasi terbaru di DKI Jakarta yang berupa Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi telah terpenuhi sebab dalam surat edaran tersebut mengamanatkan bahwa seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan tidak diperkenankan menolak peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberadaan regulasi tersebut berimplikasi pada penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di DKI Jakarta dari tahun 2015 berjumlah 371 sekolah negeri menjadi 1.111 sekolah negeri yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun 2018. Selain adanya penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, disajikan juga jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah negeri

yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat dilihat sebagaimana dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1. Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta**

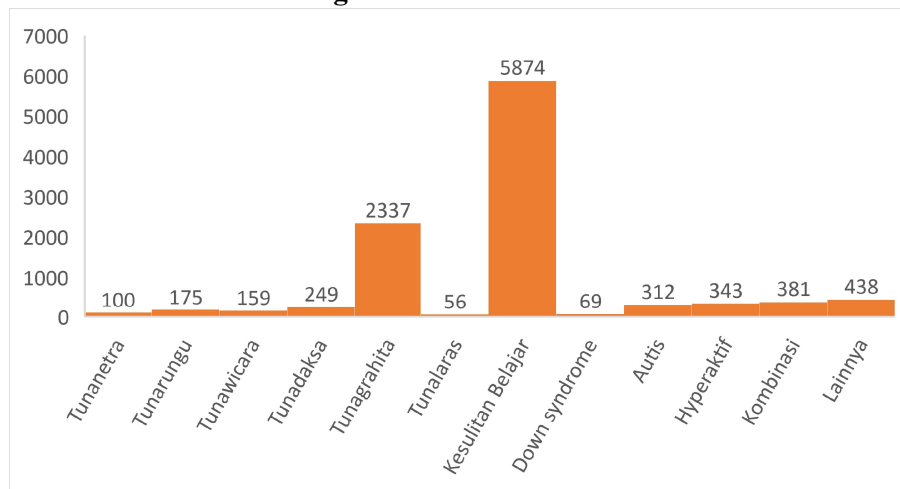


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019)

Gambar 1.1. menunjukkan adanya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus mengalami pertambahan dari sejumlah 3.148 pada 2015 menjadi 10.519 pada 2018. Hal ini dapat digunakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa adanya respon positif dari anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah negeri di DKI Jakarta pada satuan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan/atau SMK.

Lebih lanjut disajikan klasifikasi menurut jenis peserta didik berkebutuhan khusus di DKI Jakarta tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini, yaitu:

**Gambar 1.2.**  
**Klasifikasi Jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Negeri DKI Jakarta 2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019)

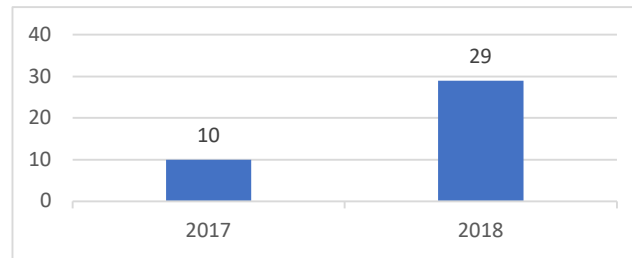
Berdasarkan Gambar 1.2 di atas menunjukkan klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus di DKI Jakarta tahun 2018, dimana sebesar 56% merupakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan kategori kesulitan belajar dari keseluruhan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah negeri DKI Jakarta.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 10 ayat 1 dan 2, bahwa:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Berdasarkan pasal tersebut, saat ini ketersediaan guru pembimbing khusus (GPK) di DKI Jakarta belum dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar 1.3.**  
**Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Provinsi DKI Jakarta**



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019)

Berdasarkan gambar 1.3. tersebut, jumlah GPK yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 tidak berbanding lurus dengan jumlah sekolah penerima peserta didik berkebutuhan khusus negeri, dimana jumlah sekolah penerima peserta didik berkebutuhan khusus negeri pada tahun 2018 berjumlah 1.111 sekolah. Kondisi ini akan berdampak pada tidak maksimalnya penanganan terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, dimana menurut Kamal Fuadi (2015) dalam jurnal yang berjudul *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta* memperoleh hasil penelitian berupa:

Keberadaan ABK tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, model dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif belum dilaksanakan, semua kategori ABK belum dapat diterima, penunjukkan sekolah-sekolah penyelenggara melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi DKI berupaya bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah.

Selanjutnya, dalam jurnal yang teliti oleh Azizah Febrianti Fash (2017) terkait dengan *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar Di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi Pada SDN Tugu Utara 11)* memperoleh hasil penelitian berupa:

Terdapat indikator evaluasi kebijakan yang tidak mendukung seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Namun demikian, terdapat indikator evaluasi kebijakan yang mendukung seperti pemerataan dan responsivitas. Selain itu, faktor penghambat utama adalah sumber daya manusia Guru Pembimbing Khusus yang tidak tersedia.

Berdasarkan beberapa jurnal di atas terkait dengan Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi yang mengamanatkan seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan harus menerima siswa berkebutuhan khusus tentunya akan menjadi tantangan tersendiri terhadap kemampuan sekolah-sekolah dalam pelaksanaannya, baik dalam hal pengadaan dan kualifikasi guru pembimbing, sarana prasarana penunjang peserta didik dan program-program untuk mengembangkan peserta didik kebutuhan khusus sehingga fokus dari penelitian ini adalah implementasi program pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Adapun, terkait dengan lokasi dari penelitian ini dengan studi di salah satu sekolah dasar negeri di DKI Jakarta, yaitu SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi, dimana sekolah tersebut merupakan salah satu contoh model sekolah inklusi sejak tahun 2005 berdasarkan SK Nomor 205/2005 dan hingga saat ini masih menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa implementasi program pendidikan inklusif di DKI Jakarta belum optimal?



Oleh sebab itu, penulis mengambil judul “Implementasi Program Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka di dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan regulasi di DKI Jakarta yang terlalu lama dan sudah harus diperbarui terkait dengan

program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang supaya terus berkembang sejalan dengan respon peserta didik berkebutuhan khusus yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program pendidikan inklusif serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai masukan kepada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- b. Sebagai masukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang merupakan merupakan penanggung jawab program pendidikan inklusif di DKI Jakarta

## 1.5. Kerangka Berpikir Teoritis

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penyusun, Judul dan Naman Jurnal	Metodologi	Temuan	Perbedaan Penelitian
1.	Kamal Fuadi  Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta  <i>(Hikmah Journal of Islamic Studies, Volume 11 Nomor 4, Agustus 2015 hlm 1-30)</i>	Deskriptif Kualitattif	Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat model pendidikan inklusif yang dijadikan acuan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Model yang terdapat dalam literatur hanya dipandang sebagai bagian dari strategi yang perlu dipahami dan diterapkan oleh guru-guru pendidikan inklusif.</li> <li>• Belum semua kategori peserta didik yang ditentukan tertampung karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, banyak orang tua anak berkebutuhan khusus enggan memasukkan anaknya ke sekolah inklusif</li> <li>• Penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.</li> <li>• Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan berupa pelatihan bagi guru inklusi, finansial, sarana prasarana dan beasiswa.</li> </ul>	Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda yaitu sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan bebrapa indikator pelaksanaan yang sama yang dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.
2	Azizah Febrianti Fasha dan Nina Widowati  Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Tugu Utara 11 tidak mendukung. Berdasarkan kriteria Dunn diperoleh hasil bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Inti regulasi sudah diketahui oleh pelaksana namun belum tersedia petunjuk teknis dan pelaksanaan, hanya tersedia surat edaran situasional</li> </ul>	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda namun penelitian ini menjadi acuan bagi penulis dalam penulisan latar belakang terkait dengan hasil penelitian

	<p>di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi pada SDN Tugu Utara 11)</p> <p>(Jurnal of public policy and management Review, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi Tidak tersedia GPK sehingga menjadikan proses belajar mengajar hanya diserahkan kepada guru reguler</li> <li>• Kecukupan Sarana prasarana khusus sudah cukup namun modifikasi kurikulum belum karena hanya berdasar pengetahuan dan kreativitas guru kelas.</li> <li>• Perataan Informasi penerimaan peserta didik baru di dapat secara terbuka ketika mengunjungi sekolah melalui banner atau dengan bertanya langsung</li> <li>• Responsivitas Warga sekolah dan masyarakat sudah cukup baik namun dukungan atau respon dari Dinas kurang optimal karena terbatasnya jumlah pengawas</li> <li>• Ketepatan Sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran namun masih belum sepenuhnya maksimal.</li> </ul> <p>Faktor Penghambat Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor SDM Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tidak tersedia</li> </ul>	<p>pendidikan inklusif di salah satu sekolah DKI Jakarta yang belum tersedia guru pembimbing khusus (GPK)</p>
3.	<p>Reza Dulisanti</p> <p>Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang</p> <p>(Indonesian Journal Dissability)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa stigma yang diberikan kepada ABK adalah stigma menghambat, memiliki nilai jelek, serta kurang bisa bergaul. Selain itu, juga terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh siswa non-berkebutuhan khusus yang tanpa mereka sadari hal itu adalah bentuk softbullying. Meskipun terjadi stigma, namun pada dasarnya siswa non-berkebutuhan khusus menerima keberadaan ABK di lingkungan sekolahnya meskipun tidak sepenuhnya. Hal tersebut terbukti dari adanya bentuk kepedulian seperti membantu jika ABK mengalami kesulitan, serta meminjami catatan yang dimiliki oleh siswa non-berkebutuhan khusus kepada ABK meskipun telah terjadi stigmatisasi.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda namun penelitian ini menjadi acuan bagi penulis dalam penulisan latar belakang terkait dengan hasil penelitian pendidikan inklusif dari aspek sosiologi</p>

	<i>Studies</i> Vol.2 No.1 Tahun 2017. Hlm 52-60)			
4.	Nissa Tarnoto  Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD  (Jurnal Humanitas Volume 13 No 1, tahun 2016 hlm. 50-61)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan inklusi adalah terkait dengan guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda namun penelitian ini menjadi acuan bagi penulis dalam penulisan latar belakang terkait dengan hasil penelitian pendidikan inklusif dari aspek psikologis

5.	<p>A.A. Ayu S. Dewi Wijayanti, Piers A, Noak, dan Putu Eka P.</p> <p>Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran)</p> <p><i>Citizen Charter</i> Volume 1 Nomor 1, Juli 2017</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mampu menerima ABK bahkan jumlah siswa ABK setiap tahun ajaran baru selalu mengalami peningkatan.</li> <li>• mampu meluluskan siswa ABK dan mengalokasikannya ke sekolah yang layak untuk ABK.</li> <li>• keragaman jenis ABK dapat di jadikan bahan evaluasi bahwa program pendidikan inklusif di Kabupaten Badung sudah mengalami kemajuan yang signifikan.</li> </ul> <p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan sumber daya kurangnya jumlah tenaga pendidik seperti Guru Pendamping Khusus</li> <li>• Belum adanya kurikulum dan standard yang disesuaikan dengan kondisi anak karena kurikulum yang digunakan hanya mempermudah atau dimodifikasi.</li> </ul>	<p>Penelitian ini menggunakan fokus yang sama dan lokus yang berbeda dengan peneliti sehingga fokus yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dalam mengkaji faktor-faktor</p>
6.	<p>Jennifer A. Kurth, Amanda L. Miller, Samantha Gross Toews, dkk</p> <p><i>Inclusive Education</i> (<i>Perspectives on</i> <i>Implementation and</i> <i>Practice From</i> <i>International Experts</i>)</p> <p><i>Intellectual and</i> <i>Developmental</i></p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• faktor-faktor dalam pelaksanaan kompleks, beragam dan dinamis seperti tata ruang, sejarah / temporal, ideologi, sosial, politik, dan unsur-unsur ekonomi.</li> <li>• strategi untuk pendidikan inklusif menggunakan lembaga kolektif, sekolah model atau percontohan, dan analisis SWOT.</li> <li>• Hambatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak PDBK ditempatkan hanya didasarkan pada diagnosis medis atau penilaian akademik.</li> <li>- Keberadaan PDBK tetap dipisahkan dari kelas peserta didik regular karena dianggap “mengganggu” kegiatan belajar mengajar</li> <li>- Dukungan eksternal yang belum mengerti bagaimana menyelenggarakan pendidikan inklusif</li> </ul> </li> </ul>	<p>Penelitian ini berfokus pada strategi yang memperhatikan faktor-faktor kontekstual dengan menggunakan teori sistem ekologi. Lokus penelitian ini negara-negara di 5 benua yang dibahas melalui perwakilan dari 11 ahli pendidikan bertaraf internasional sehingga menjadi acuan dalam mengkaji faktor</p>

	<i>Disabilities Journal</i> , Volume 56 Nomor 6, tahun 2018 hlm. 471- 485			pendukung dan penghambat dalam penelitian ini
7.	Bucknor, Elizabeth Lee  <i>Implementing Inclusive Education in West Africa (Achieving Sustainable Development)</i>  Doctoral dissertation, The George Washington University, 2018	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah: Dari segi pemangku kepentingan: - kurangnya pelatihan (pelatihan awal dan pelatihan berkelanjutan termasuk pelatihan layanan guru) - kualitas pendidikan rendah, - kebutuhan aksesibilitas infrastruktur untuk pelatihan kelas inklusi khusus - sumberdaya moneter (anggaran untuk buku, peralatan, dan teknologi) Hambatan dalam pelaksanaan - sistem yang kurang mendukung dan tidak konsisten - sifat yang tidak inklusif dari masyarakat - banyak anak berkebutuhan khusus yang disembunyikan oleh orang tuanya di dalam rumah - kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan LSM yang minim	Penelitian ini menggunakan teori implementasi <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> dengan fokus pada kerjasama antar pemangku kepentingan. Lokus dari penelitian merupakan 15 negara dalam Global Partnership for Education di Kawasan Afrika Barat. Penelitian ini digunakan sebagai pertimbangan dalam mengkaji faktor-faktor
8.	Asal Wahyuni Erlin Mulyadi  <i>Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia</i>  Policy & Governance Review, Volume 1, Issue 3, September 2017	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: • Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusif telah meningkat secara signifikan, didukung juga oleh provinsi dan peraturan yang berbeda • Permasalahan secara global ditemui kurangnya guru terlatih dan pemahaman mereka, kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan dari masyarakat serta kurangnya informasi dan sikap diskriminatif terhadap penyandang cacat.	Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap regulasi yang digunakan dalam kebijakan pendidikan inklusif dengan lokus secara global di Indonesia. Penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam latar belakang terkait dengan kondisi pendidikan inklusif di Indonesia.

9.	<p>Sarah K. Benson</p> <p><i>The Evolution Of Jordanian Inclusive Education Policy And Practice</i></p> <p>FIRE: Forum for International Research in Education Vol. 6, Iss. 1, 2020, pp. 102-121</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Yordania mendukung program pendidikan khusus di sekolah-sekolah namun dalam implementasinya masih terbatas oleh sumber daya yang tidak memadai, pelatihan, kurangnya dukungan masyarakat dan sumber daya fisik</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada menguraikan kondisi pendidikan inklusif dengan lokus di tingkat internasional, nasional dan lokal di Yordania berdasarkan tinjauan kebijakan dan literatur akademik. Penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam latar belakang yang memandang kebijakan inklusif dari segi global.</p>
10.	<p>Rita Oktadiana dan Amika Wardana S</p> <p><i>The Implementation of Inclusive Education Policy for Disabled Students in Indonesia</i></p> <p>Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 296 ICSIE 2018</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil studi literatur yang diperoleh bahwa beberapa kota di Indonesia mulai memiliki sekolah inklusif, di mana implementasinya merupakan kolaborasi antara sekolah dan pemerintah kota. Bahkan, masih sulit untuk mewujudkan sekolah inklusif yang dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Salah satu kesulitannya adalah masih ada orang yang belum menerima siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, juga ketidakharmonisan antara pihak-pihak dalam menerapkan sekolah inklusif, seperti persyaratan guru yang berkualifikasi dan sekolah harus sepenuhnya mendukung implementasi sekolah inklusif. Dengan demikian pengorganisasian sekolah inklusif di Indonesia belum memenuhi konsep yang disajikan dan pedoman pelaksanaan, dalam hal siswa, kualifikasi guru, fasilitas dan infrastruktur, serta dukungan orang tua dan masyarakat</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap regulasi yang digunakan dalam kebijakan pendidikan inklusif dengan lokus secara global di Indonesia. Penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam latar belakang terkait dengan kondisi pendidikan inklusif di Indonesia.</p>



Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, masukan dan memberi pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan fenomena penelitian dipilih berdasarkan fokus, lokus, teori maupun konsep yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan fokus dan lokus dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamal Fuadi (2015) memiliki persamaan fokus penelitian berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diukur dengan fenomena berdasarkan pelaksanaannya sehingga menjadi acuan bagi penulis dalam menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di DKI Jakarta sementara pada penelitian yang dilakukan oleh A.A. Ayu S. Dewi Wijayanti, Piers A, Noak, dan Putu Eka P (2017) terdapat persamaan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu Edward III yang dijadikan acuan dalam meneliti mengenai faktor pendorong dan penghambat program pendidikan inklusif di DKI Jakarta.

#### **1.5.2. Administrasi Publik**

Chalder & Plano (dalam Keban, 2010:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan, Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong, 2014:7), mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi

implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan Teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Selanjutnya, Harbani Pasolong (2014) mendefinisikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan publik melalui formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

### **1.5.3. Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Kuhn (dalam Keban, 2010:31) paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry (dalam Keban, 2010:31) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara akibat adanya krisis atau *anomalies* terhadap suatu cara pandang tertentu yang mendapat tantangan dari luar sehingga orang mulai mencari cara pandang yang lebih

sesuai atau dengan kata lain, muncul suatu paradigma baru. Kelima paradigma tersebut yaitu:

*Paradigma 1 (1900-1926)* dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat yang dilaksanakan oleh Lembaga Legislatif, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut yang dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif. Implikasi dari paradigma ini diarahkan pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Adapun kekurangan dari paradigma ini yaitu hanya ditekankan pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintah, sedangkan aspek fokus atau metode apa yang harus dikembangkan tidak dibahas secara rinci.

*Paradigma 2 (1927-1937)* disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Paradigma ini memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik yang dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*), dimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal sehingga lokus dari

administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas. Dengan demikian, dalam paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Paradigma ini bermula dari adanya pertentangan anggapan antara *value-free administration* di suatu pihak dengan anggapan *value-ladden politics* di lain pihak. Dalam prakteknya, ternyata anggapan kedua yang berlaku karena sifat universal yang dimiliki oleh administrasi publik sehingga menjadi tidak bebas nilai. Untuk itu, John Gauss mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Namun, tidak ada tokoh yang memberikan jalan keluar terhadap kritik tersebut sehingga pada masa itu, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

*Paradigma 4 (1956-1970)* adalah Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dsb. merupakan fokus dari paradigma ini. Terjadi perkembangan dua arah dalam paradigma ini yaitu pertama, berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang

didukung oleh disiplin psikologi sosial dan kedua, berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus diasumsikan dapat dikembangkan di dalam dunia bisnis dan administrasi publik sehingga lokus dalam paradigma ini menjadi tidak jelas.

*Paradigma 5 (1970-sekarang)* adalah administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Kemudian, Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe, 2017) memperbarui tulisannya menjadi 6 paradigma yaitu paradigma terakhir adalah *governance* (1990-sekarang). Paradigma ini menurut Tamayo didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara atau rakyatnya, proses ini menjadi kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Stoker bahwa telah mengajukan lima proposisi kritis dan dilematis yang sebagian besar telah menjadi prinsip paradigma ini adalah:

- (1) Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan di luar pemerintah

- (2) Batas yang abu-abu dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi
- (3) Ketergantungan kekuasaan di antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
- (4) Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri
- (5) Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan wewenangnya

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma 5 yang berlangsung sejak 1970 hingga sekarang, yaitu paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara karena fokus dari administrasi ini terkait dengan kebijakan publik yang meliputi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik yang membahas mengenai bagaimana keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dijadikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan publik bagi para penyandang disabilitas untuk mendapat pelayanan yang sama di bidang pendidikan.

#### **1.5.4. Kebijakan Publik**

Chandler dan Plano (dalam Keban,2010:60) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano menjelaskan lebih lanjut bahwa publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang

tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Selain itu, William N. Dunn (dalam Pasolong, 2014) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Selanjutnya, Peterson (dalam Keban, 20:61) mengemukakan bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”

Berdasarkan ketiga pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian dalam pemecahan masalah publik dengan sumber-sumber daya yang ada demi kepentingan publik termasuk orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.

#### **1.5.5. Proses Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan atau proses. Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti James Anderson (dalam Pasolong, 2014) yang mengemukakan bahwa tahapan kebijakan publik terkait pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari:

1. Formulasi masalah:

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

## 2. Formulasi kebijakan

Bagaimana mengembangkan pilihan- pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

## 3. Penentuan kebijakan

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

## 4. Implementasi kebijakan

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

## 5. Evaluasi kebijakan

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?

Sedangkan, proses kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Keban, 2010: 67) terdiri dari:

### 1. Perumusan masalah atau penyusunan agenda



Proses menentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan melalui *problem structuring*

2. Peramalan atau formulasi kebijakan

Proses mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah menggunakan *forecasting*, dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan

3. Rekomendasi atau adopsi kebijakan

Proses menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan administrator dan legislatif. Tahapan ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi kebijakan

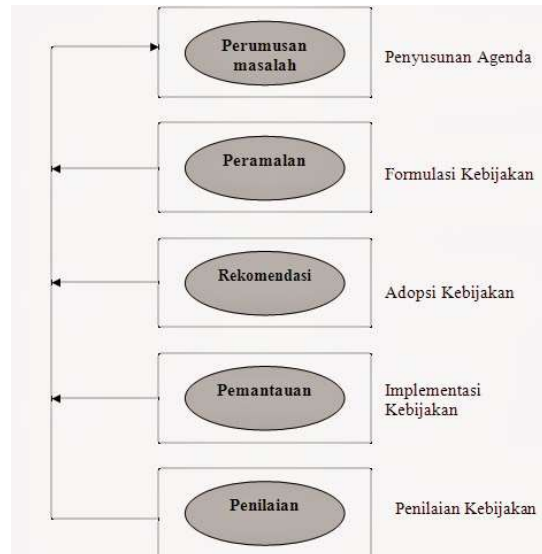
4. Pemantauan atau implementasi kebijakan

Proses dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Dalam proses tersebut proses monitoring dilakukan

5. Penilaian kebijakan

Proses dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi dilakukan

**Gambar 1.4**  
**Proses Kebijakan Publik Menurut William Dunn**



Sumber: Keban (2010)

Selanjutnya, Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2010)

mengemukakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari:

1. *Agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi
2. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan
3. Implementasi
4. Evaluasi program dan analisis dampak; dan
5. *Feedback* yaitu memutuskan untuk melakukan revisi atau melakukan pemberhentian. Proses ini menyerupai suatu siklus.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan terdiri dari pertama, *agenda setting* yaitu mencakup identifikasi masalah-masalah dalam kebijakan publik. Kedua, *policy adoption* yaitu bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut dijawab dengan menentukan kebijakan apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ketiga,

implementasi berupa pelaksanaan secara nyata dari kebijakan yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan yang ada supaya tercapai tujuan. Keempat, evaluasi untuk menilai dan melakukan revisi kebijakan dengan membandingkan antara target dan capaian, dan yang terakhir adalah *feedback*, yaitu melakukan revisi atau pemberhentian terhadap kebijakan yang diimplementasikan dengan mempertimbangkan hasil dari evaluasi.

### **1.5.6. Implementasi Kebijakan Publik**

#### **1.5.6.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi menurut Bernadie R Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2014) adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Sedangkan, Hinggis (dalam Pasolong, 2014) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Gordon (dalam Keban, 2010) bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-

pembayaran atau dengan kata lain, implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukann baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan merealisasikan rencana menggunakan sumber daya manusia dan sumberdaya lain dengan metode-metode tertentu agar tujuan dari rencana yang sudah diformulasikan dapat terwujud.

#### **1.5.6.2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik memiliki model-model sebagaimana telah dijelaskan menurut para ahli. Beberapa model implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

##### **1) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

##### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan realistis dengan kondisi sosio kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. dalam implementasi kebijakan diperlukan. Hal ini baik mencakup sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

c. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini diasumsikan apabila koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat baik, maka kesalahan akan sangat kecil terjadi

d. Karakteristik Agen Pelaksana.

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

e. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Hal ini mencakup sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.

Hal ini mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan; dan intensitas disposisi implementor atau preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2) Model George C. Edwards III

Edward III (dalam Winarno, 2014) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya, Edward III menjelaskan terdapat empat variabel yang mendukung dan menghambat dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terhadap kebijakan atau program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program atau kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel:

- a. Transmisi

Yakni penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (*miskomunikasi*) yang disebabkan karena komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi.

- b. Kejelasan

Yakni komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dimengerti dan tidak membingungkan agar mudah melakukan tindakan.

c. Konsistensi

Yakni pemberian perintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang bersifat konsisten dan jelas (untuk ditetapkan dan dijalankan). Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan telah memiliki unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana dalam menjalankan kebijaksanaan dengan baik.

2. Sumber daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya apabila dirinci lebih lanjut meliputi:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan



oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting

dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yaitu, pertama badan-badan birokrasi pemerintah bersifat homogen. Tingkah laku yang homogen berkembang karena model rekrutmen staf baru yang berlangsung secara selektif. Selanjutnya, aspek lain yang merupakan sifat badan pemerintah adalah berkembangnya pandangan-pandangan parokial yang disebabkan karena terlalu sedikitnya jumlah pembuat keputusan tingkat tinggi yang menghabiskan masa jabatannya suatu

badan atau departemen serta pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik Terdapat dua karakteristik yang mendukung dan menghambat pada kinerja struktur birokrasi, yaitu:

a. Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit

kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

### 3) Model Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi publik menurut Marilee S. Grindle (1980) dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin di raih). Selain itu keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context implementation*). Variabel isi kebijakan (*content of policy*) ini mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
- c. Sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan, variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
  - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
  - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
- 4) Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)

Dalam pandangan Weimer dan Vining, ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a. Logika dari suatu kebijakan.

Hal ini agar kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis. Logika dari suatu kebijakan merupakan hubungan logis dari suatu hipotesis. Selain itu, isi dari kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang dapat memungkinkan kebijakan atau program tersebut diimplementasikan pada tataran praktis.

- b. Lingkungan tempat kebijakan.

Hal ini dioperasikan agar memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

c. Kemampuan implementor.

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

5) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabaiter (1983)

Kedua ahli kebijakan ini mengemukakan bahwa peran penting dari kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi, yakni:

a. Karakteristik masalah

- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
- Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b. Karakteristik kebijakan

- Kejelasan isi kebijakan.
- Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis..
- Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
- Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
- Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

- Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Lingkungan kebijakan

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- Kesiapan dari kelompok pemilih (*constituency groups*)
- Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan fokus pada implementasi program pendidikan inklusif berdasarkan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta sedangkan lokusnya di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi.

### **1.5.7. Konsep Pendidikan Inklusif**

#### **1.5.7.1. Pengertian Pendidikan Inklusif**

Staub dan Peck (dalam Ilahi, 2013) berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimana pun gradasinya. Selanjutnya, pendidikan inklusif didefinisikan menurut Direktorat PSLB (2004) adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan

khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pendidikan inklusif mempunyai empat karakteristik makna, antara lain:

- 1) Proses yang berjalan terus dalam usaha menemukan cara-cara merespons keragaman individu
- 2) Mempedulikan cara untuk meruntuhkan hambatan anak dalam belajar
- 3) Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar

Selanjutnya, makna pendidikan inklusif menurut Prof. Mulyono dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai “pendidikan bagi



semua” (*education for all*). Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menciptakan sikap yang tidak diskriminatif dan terselenggaranya pendidikan bagi semua.

#### **1.5.7.2.Prinsip Pendidikan Inklusif**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dijelaskan menurut buku pedoman yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa terdiri dari:

1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu

Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan.

2) Prinsip keberagaman

Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik.

3) Prinsip kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didik.

4) Prinsip keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan

5) Prinsip keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Prinsip pendidikan inklusif dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu:

1) Pendidikan yang ramah

Memberikan hak kepada anak untuk belajar, mengembangkan potensinya secara optimal di dalam lingkungan yang aman dan terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pembelajaran pada setiap anak dan guru menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran.

2) Prinsip pengembangan seoptimal mungkin

Peserta didik berkebutuhan khusus diupayakan mendapatkan pelayanan pendidikan seoptimal mungkin sesuai dengan keterbatasannya dan diharapkan hambatan yang dimiliki dapat diatasi sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler atau dengan kata lain diupayakan lingkungan terbaik bagi perkembangan mereka.

3) Kerjasama

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diperlukan adanya kerja sama antar semua stakeholder, yaitu yang terdiri atas:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah
- b. Perguruan Tinggi
- c. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga
- d. Komite sekolah
- e. Pendidik (baik guru mata pelajaran atau guru pembimbing khusus)
- f. Kepala sekolah
- g. Pusat Sumber / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- h. Masyarakat
- i. Profesional atau ahli (psikolog, optalmolog, therapis, dll)
- j. Pengawas sekolah
- k. Peserta didik yang memiliki keberagaman karakteristik
- l. Peserta didik berkebutuhan khusus

### **1.5.7.3. Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus menurut Mohammad Takdir (2013) adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelalaian atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi dan perilaku yang menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya. Selanjutnya, Esthy (2014) menjelaskan macam-macam anak berkebutuhan khusus yaitu:

#### 1) Tunanetra

Gangguan atau kelainan yang terjadi pada indra penglihatan seseorang sehingga orang tersebut mengalami kendala dalam beraktivitas. Hingga akhirnya, ia memerlukan alat khusus yang dapat membantu penglihatan atau menggantikan fungsi matanya.

#### 2) Tunarungu

Amin (1995) mengemukakan bahwa anak tunarungu adalah mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh organ pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangannya sehingga memerlukan bimbingan pendidikan khusus.

#### 3) Tunagrahita

Menurut AAMD (*American Association on Mental Deficiency*), ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada di bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung (termanifestasi) pada masa perkembangannya.

#### 4) Autisme

Gangguan perkembangan kompleks yang gejalanya harus sudah muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Gangguan neurologi pervasif ini terjadi pada aspek neurobiologis otak dan memengaruhi proses perkembangan anak. Akibat gangguan ini, sang anak tidak dapat secara otomatis belajar

untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga ia seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri.

5) *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*

Gangguan psikiatrik yang cukup banyak ditemukan dengan gejala utama inatensi (kurangnya perhatian), hiperaktivitas, dan impulsivitas (bertindak tanpa dipikir) yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan anak, remaja, atau orang dewasa

6) Tunadaksa

Penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi.

7) Tunalaras

Anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma masyarakat tempat dia berada.

8) Tunawicara

Menurut Purwanto (1998), tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan, baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan

9) Kesulitan Belajar

Menurut The National Joint Committee for Learning Disability (NJCLD) kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, bernalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematik. Gangguan tersebut instrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat.

## **1.6. Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian merupakan objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang akan diteliti.

### **Fenomena Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta**

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang diselenggarakan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menciptakan sikap yang tidak diskriminatif dan terselenggaranya pendidikan bagi semua. Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif DKI Jakarta tahun 2012, fenomena yang diteliti, yaitu:

#### 1. Kesiswaan

- Daya tampung peserta didik
- Pelaksanaan prosedur pendaftaran penerimaan peserta didik baru
- Pelaksanaan identifikasi dan asesmen

#### 2. Kurikulum

- Pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan
- Pelaporan hasil belajar

#### 3. Ketenagaan

- Ketersediaan tenaga kerja
- Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan
- Pelatihan dan pembinaan yang didapat
- Pelaksanaan pengawasan dan supervisi

#### 4. Sarana Prasarana

- Kelengkapan sarana prasarana

#### 5. Pendanaan

- Ketersediaan Dana
- Akuntabilitas alokasi dana

#### 6. Lingkungan

- Peran komite sekolah
- Hubungan kerjasama dengan lembaga lain

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

#### 1. Komunikasi

- Transmisi

Penyaluran informasi dari pihak sekolah kepada para orang tua peserta didik berkebutuhan khusus

- Kejelasan

Kejelasan informasi yang diterima oleh orang tua peserta didik berkebutuhan khusus

- Konsistensi

Konsistensi informasi yang diterima oleh orang tua peserta didik berkebutuhan khusus

#### 2. Sumber daya

- Staf

Kecukupan, tingkat memadai dan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga pendidik

- Informasi



Cara melaksanakan dan data kepatuhan dari pendidik dan tenaga pendidik terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

- Wewenang

Otoritas atau legitimasi bagi pendidik dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

- Fasilitas

Fasilitas fisik atau sarana prasarana yang tersedia di sekolah

### 3. Disposisi

- Komitmen

Pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik

- Kejujuran

Kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik

### 4. Struktur birokrasi

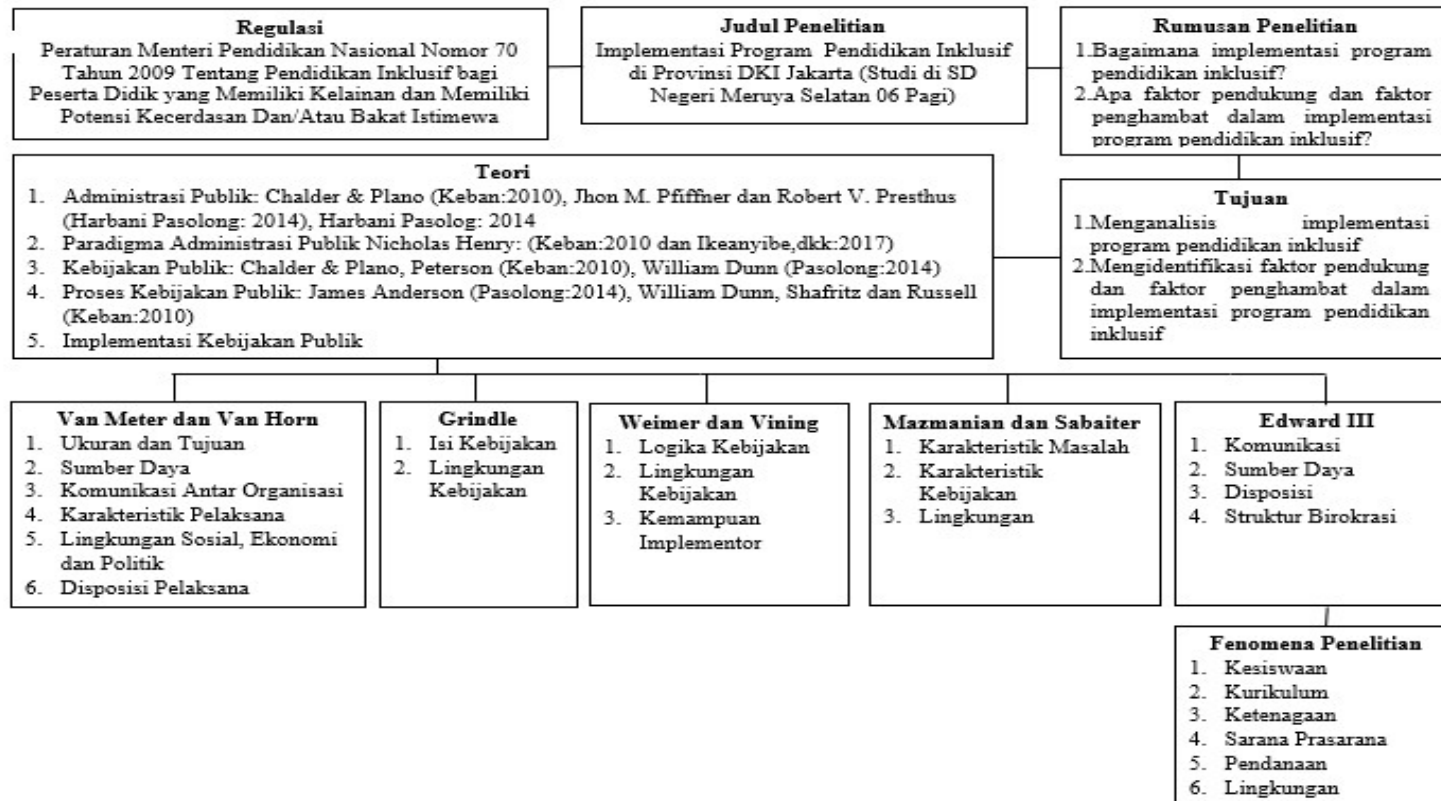
- Standard Operasional Prosedur (SOP)

Mekanisme yang tercantum dalam *guideline* program

- Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab kepada pendidik dan tenaga pendidik

**Gambar 1.5**  
**Bagan Kerangka Pikir**



## 1.7 Metoda Penelitian

### 1.7.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian menurut Hasan (2002) adalah keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat dijawab. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Meleong (dalam Fitrah dan Luthfiyah, 2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Finlay (dalam Fitrah dan Luthfiyah, 2017) juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah berbasis konsep "going exploring yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.

Selanjutnya, penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Hasan (2002) mendefinisikan penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jadi, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena

masyarakat (sosial) tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Berdasarkan kedua hal tersebut, pada penelitian ini akan menganalisis dan mengidentifikasi secara lebih luas terkait dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraannya berdasarkan fenomena implementasi dan faktor implementasi menurut Edward III, seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dengan menggunakan konsep "*going exploring*" yang melibatkan kasus tunggal di salah satu sekolah negeri untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terjadi di suatu sekolah.

### **1.7.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi di salah satu sekolah dasar di Provinsi DKI Jakarta, yaitu SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yang beralamat di Jl. Lapangan Jabek Mega Kebon Jeruk Rt. 002/001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Wilayah Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive*, dimana menurut Sugiyono (2016) merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang

bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif. Untuk itu, dalam penelitian ini para informan tersebut diantaranya:

- 1) Dinas Pendidikan DKI Jakarta
- 2) Kepala Sekolah
- 3) Guru Pendamping Khusus (GPK)
- 4) Guru Kelas
- 5) Staff tata usaha
- 6) Orang tua peserta didik berkebutuhan khusus
- 7) Orang tua peserta didik reguler

#### **1.7.4. Jenis Data**

Menurut lofland dan Lofland (Dalam Moleong, 2007) jenis data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian yang menggambarkan atau merepresentasikan para implementor dalam kebijakan pendidikan inklusif beserta tindakan-tindakan yang dilakukan serta dokumen-dokumen yang terakait.

#### **1.7.5. Sumber Data**

Berdasarkan sumber pengambilannya, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Hal ini dilakukan pada ruang lingkup utama SD

Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dan ruang lingkup pendukung yaitu Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada yaitu berupa regulasi yang mengatur dan juga teori yang terkait dengan implementasi kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif serta penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nazir (2009) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pengumpulan data dengan observasi langsung, yaitu mengadakan pengamatan langsung sebagai observer tak partisipan yang berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di ruang kelas pada sekolah inklusif. Selain itu, cara pengamatan yang dilakukan dengan observasi tak berstruktur, dimana peneliti bebas melakukan pengamatan tanpa menggunakan pedoman pengamatan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di salah satu ruang kelas.
2. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden

dicatat atau direkam. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan wawancara berstruktur, dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan para *stakeholder* yang relevan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, notulen rapat, dan sebagainya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.

#### **1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016), yaitu meliputi:

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup

banyak, sehingga dengan adanya reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya kembali apabila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Hal ini berkaitan dengan penyajian data yang dilakukan setelah reduksi data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif dan juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jenjang kerja), dan *chart*.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tetapi, bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 1.7.8. Kualitas Data

Uji keabsahan atau kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai berbagai cara. Salah satunya dapat dilakukan dengan triangulasi. Menurut Willian Wiersma (dalam Sugiyono, 2016) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, cara, dan waktu. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:



1. Triangulasi sumber

Hal ini dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dimana data yang didapat dideskripsikan dan dikategorisasikan terhadap pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dimintakan kesepakatan (*sumber checked*).

2. Triangulasi teknik

Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian dicek lagi dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Hal ini berkenaan dengan waktu melakukan pengumpulan data seperti dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber memberikan data lebih valid dan kredibel. Untuk itu pada triangulasi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar, setelah itu dengan wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada triangulasi sumber peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti Staff Dinas Pendidikan DKI Jakarta, wakil kepala, guru pembimbing khusus, guru kelas, staff TU, perwakilan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dan perwakilan

orang tua peserta didik regular. Sedangkan pada triangulasi teknik, peneliti melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian dicek lagi dengan observasi di ruang kelas dan ruang sumber serta dokumentasi.